

### Penulis

**Nauli A. Desdiani**

nauli.desdiani@lpem-feui.org

**Andhika P. Pratama**

andhika.pratama@lpem-feui.org

### Editor

**Jahen F. Rezki**

jahen@lpem-feui.org

## Meninjau 'Student Loan' Sebagai Alternatif Pembiayaan Untuk Peningkatan Akses ke Pendidikan Tinggi

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak hanya menjadi salah satu komitmen pemerintah Republik Indonesia sekarang, namun juga merupakan bagian dari program unggulan para calon presiden dan wakil presiden di dalam pemilu tahun ini. Sektor pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, merupakan salah satu pilar utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional. Beragam studi telah menunjukkan pentingnya peran pendidikan sebagai alat mobilitas vertikal dan menurunkan kemiskinan. Meningkatkan akses pada pendidikan berarti meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karenanya, meningkatkan akses terhadap pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, menjadi salah satu aspek evaluasi utama di sektor pendidikan.

### Tantangan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi

Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK-PT) nasional per tahun 2023 mencapai 31,45% (BPS, 2023), masih jauh di bawah target APK-PT untuk tahun 2024 pada Rencana Strategis Kemendikbudristek tahun 2020-2024 yang mencapai 37,63%.<sup>1</sup> Angka ini juga relatif rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand (49,1%), Viet Nam (42,2%) dan Malaysia (40,3%) di tahun 2022 (World Bank, 2022). Tidak hanya angka partisipasi, isu pendidikan tinggi di Indonesia juga menyangkut disparitas pada berbagai kelompok, termasuk masyarakat berpendapatan rendah, *gap* antara desa dan kota, serta disparitas geografis antara Indonesia bagian barat dan timur. Tercatat lebih dari 70% mahasiswa berasal dari kelas kuantil pendapatan tertinggi, sementara hanya 10% yang berasal dari tiga kuantil pendapatan terbawah (World Bank, 2020). Angka di atas menunjukkan masih rendahnya akses terhadap pendidikan tinggi di Indonesia.

Dari sisi *supply*, penyediaan jasa pendidikan tinggi juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dari 20% anggaran pendidikan, hanya 5% yang dialokasikan untuk pendidikan tinggi, atau setara dengan 0,4% dari PDB nasional, jauh di bawah Malaysia (1,7%), dan Thailand (0,7%) (World Bank, 2020). Dengan kontribusi dari pemerintah yang terbatas, beban finansial yang besar ditanggung oleh peserta didik (mahasiswa). Bantuan pembiayaan untuk mahasiswa di perguruan tinggi diestimasi hanya mencakup 3% dari total biaya selama menjalani pendidikan tinggi (World Bank, 2020). Kondisi ini memperburuk akses pada masyarakat menengah dan bawah dalam mengakses pendidikan tinggi.

To keep you updated with our free monthly and quarterly reports, please subscribe. Scan the QR code below



<sup>1</sup> (Kemendikbudristek, 2022)

**“Dengan kontribusi dari pemerintah yang terbatas, beban finansial yang besar ditanggung oleh peserta didik (mahasiswa)”**

To keep you updated with our free monthly and quarterly reports, please subscribe. Scan the QR code below



## Konteks Kebijakan: Pinjaman Mahasiswa sebagai Alternatif Pembiayaan Pendidikan Tinggi

Isu terkait akses pada pendidikan tinggi mencuat seiring dengan berbagai pemberitaan terkait keberadaan pinjaman *online* (pinjol) yang ditawarkan sebagai salah satu opsi pembiayaan kuliah di salah satu perguruan tinggi nasional.<sup>2</sup> Kondisi ini direspon oleh pemerintah dengan membuka opsi kebijakan pinjaman mahasiswa (*student loan*) yang bersumber dari dana abadi pendidikan di bawah LPDP (Kemenkeu, 2023). Fenomena ini menimbulkan beberapa pertanyaan lanjutan yang perlu dijawab. Mengapa *student loan*? Apa rasionalisasi dibalik kebijakan ini? Bagaimana pengalaman banyak negara yang telah lebih dahulu menawarkan opsi *student loan* sebagai pembiayaan untuk mahasiswa?

Pinjaman mahasiswa bukan barang baru bagi Indonesia. Di era orde baru sekitar tahun 1982, pinjaman serupa diperkenalkan dalam bentuk Kredit Mahasiswa Indonesia (Bank Indonesia, 2013). Sebagaimana namanya, kredit ini diberikan kepada mahasiswa dengan penyaluran via beberapa bank seperti BNI 46, BRI, dan Bank Ekspor-Impor Indonesia. Kebijakan tersebut kemudian ditutup melalui Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 22/81/KEP/DIR/1990 tentang Penyempurnaan Sistem Perkreditan. Isu kredit macet dan manajemen yang buruk menjadi salah satu alasan tidak berkembangnya program tersebut.<sup>3</sup>

## Rasionalisasi Ekonomi dibalik Pinjaman Mahasiswa

Pendidikan adalah investasi. Seperti investasi pada umumnya, pendidikan membutuhkan biaya yang besar yang harus dikeluarkan pada saat ini, namun akan mendatangkan banyak keuntungan di masa depan. Ketika seseorang menempuh pendidikan, akan ada banyak biaya yang harus dikorbankan, baik itu biaya langsung (biaya pokok pendidikan, buku) hingga *opportunity cost* seperti waktu luang yang dapat dia digunakan untuk bekerja atau bersantai. Ekonom sekaligus pemenang nobel, Gary S. Becker (1966) menyatakan bahwa setiap orang dapat memaksimalkan tingkat kesejahteraannya dengan ber-‘investasi’ di tingkat pendidikan formal sebagaimana diukur dari lama waktu sekolah. Tidak heran, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh seseorang, maka ketika bekerja, akan semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang diperoleh. Kondisi ini pada nantinya bisa meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan aspek kesejahteraan, kesehatan, dan kebahagiaan.

Sayangnya, tidak semua orang memiliki *privilege* yang sama. Umumnya, seseorang yang dapat melanjutkan sekolah hingga pendidikan tinggi adalah mereka yang memiliki latar belakang sosial ekonomi keluarga yang mampu atau memiliki tingkat

<sup>2</sup> (Media Indonesia, 2024; Kompas, 2024; CNN Indonesia, 2024)

<sup>3</sup><https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/02/05/pinjaman-pendidikan-kmi-berakhir-lantaran-macet>

**“Mereka juga tidak bisa memenuhi standar beasiswa yang ada saat ini, yakni mahasiswa pra-sejahtera yang berlatarbelakang dari keluarga miskin dan/atau beasiswa untuk mahasiswa pintar”**

**“...Kelompok mahasiswa inilah yang sangat rentan untuk putus sekolah sehingga memerlukan bantuan pendanaan untuk bisa melanjutkan pendidikan hingga menyelesaikan perguruan tinggi.”**

To keep you updated with our free monthly and quarterly reports, please subscribe. Scan the QR code below



kecerdasan inividu yang tinggi. Di Indonesia, masih banyak siswa yang tidak dapat menempuh pendidikan tinggi atau bahkan tidak melanjutkan kuliah karena mengalami kesulitan dalam membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Mereka juga tidak bisa memenuhi standar beasiswa yang ada saat ini, yakni mahasiswa pra-sejahtera yang berlatarbelakang dari keluarga miskin dan/atau beasiswa untuk mahasiswa pintar. Kelompok mahasiswa ini berasal dari latar belakang keluarga menengah bawah, yang tidak bisa mendapatkan bantuan beasiswa pra-sejahtera atau afirmasi. Untuk memperoleh beasiswa unggulan dengan persyaratan IPK tinggi atau memiliki keahlian tertentu pun sangat sulit dijangkau, karena mahasiswa yang berkategori ini umumnya kuliah sambil bekerja atau memang tidak memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata. Kelompok mahasiswa inilah yang sangat rentan untuk putus sekolah sehingga memerlukan bantuan pendanaan untuk bisa melanjutkan pendidikan hingga menyelesaikan perguruan tinggi.

Sejatinya, pendidikan merupakan barang publik dan hak seluruh masyarakat terlepas apapun kondisi latar belakang sosial-ekonominya. Namun, realitanya pendidikan tinggi yang berkualitas hanya dapat diakses oleh masyarakat berpendapatan atas. Biaya UKT bagi mahasiswa di perguruan tinggi masih dirasa mahal bagi sebagian kalangan. Terdapat kegagalan pasar (*market failure*) dalam pendidikan. Sektor swasta seperti pinjaman *online* (pinjol) bisa hadir karena adanya peluang menguntungkan dari penawaran fasilitas pinjaman pendidikan dengan bunga yang cenderung tinggi dan tenor yang rendah. Hal ini dilakukan untuk menutupi potensi kerugian yang tinggi akibat risiko gagal bayar yang besar, dan ketiadaan jaminan ketika mahasiswa lulus dan mendapatkan pekerjaan akan mengembalikan pinjaman yang diambil. Pada umumnya pula, kelompok mahasiswa menengah bawah yang menjadi target pasar dari pinjaman *online*. Ironisnya, perusahaan-perusahaan pinjaman *online* juga bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dalam menawarkan opsi pembiayaan UKT bagi mahasiswa.

Disinilah peran penting kehadiran pemerintah untuk mengatasi *market failure*. Program pinjaman mahasiswa yang disediakan langsung oleh pemerintah dapat menjadi salah satu solusi alternatif pembiayaan murah dan terjangkau bagi kelompok masyarakat menengah bawah yang tidak ter-cover ke dalam beasiswa yang tersedia, sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan partisipasi dan akses masyarakat ke pendidikan tinggi.

### **Merumuskan Kebijakan Pinjaman Mahasiswa yang Tepat**

Apabila pemerintah ingin menerapkan kebijakan pinjaman pendidikan tinggi bagi masyarakat, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar pinjaman yang diberikan sesuai dengan tujuan dasarnya, yaitu mengoreksi *market failure* dan menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi. **Pertama**, dalam pelaksanaan kebijakan ini, pemerintah tidak bisa memberlakukan

**“Program pinjaman mahasiswa yang disediakan langsung oleh pemerintah dapat menjadi salah satu solusi alternatif pembiayaan murah dan terjangkau bagi kelompok masyarakat menengah bawah yang tidak ter-cover ke dalam beasiswa yang tersedia, sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan partisipasi dan akses masyarakat ke pendidikan tinggi”**

To keep you updated with our free monthly and quarterly reports, please subscribe. Scan the QR code below



tingkat suku bunga pinjaman yang sama seperti suku bunga konvensional sebagaimana pada umumnya pinjaman ke institusi keuangan atau rate premi asuransi yang mengukur berdasarkan tingkat risiko debitur. Semakin tinggi risikonya maka akan semakin tinggi tingkat suku bunga yang perlu dibayarkan.

Dalam konteks pinjaman mahasiswa, pemerintah perlu memberikan insentif berupa subsidi bunga seperti konsep program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga suku bunga yang diterapkan harus rendah atau bahkan nol persen bagi mahasiswa pra-sejahtera terutama selama masa studinya. Meskipun subsidi bunga ini jelas mengurangi nilai pengembalian yang baru akan dimulai setelah siswa lulus kuliah, namun insentif ini sangat mendorong kehadiran masyarakat untuk belajar ke perguruan tinggi dan membuat pinjaman akan lebih mudah dikelola. Kebijakan subsidi bunga untuk pinjaman mahasiswa telah diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jerman, Inggris, Selandia Baru, dan India. Skema subsidi ini umumnya diberikan khusus untuk jenjang sarjana selama jangka waktu studi, bervariasi berdasarkan status mahasiswa apakah dia dependen/independen serta tingkat pendapatan orang tua.

Sebuah studi dari Dynarski (2021) yang membahas konsep pinjaman mahasiswa di Amerika Serikat menyatakan bahwa tingkat bunga yang lebih rendah dapat mengurangi beban pembayaran bulanan yang diperlukan untuk menutupi pokok angsuran dan bunga. Dalam hal ini, tingkat suku bunga yang rendah akan membuat pembayaran pinjaman lebih mudah dikelola oleh peminjam marjinal dan dengan demikian mengurangi gagal bayar.

**Kedua**, Indonesia sebaiknya menerapkan model pinjaman mahasiswa berbasis pendapatan sebagaimana yang sudah diimplementasikan di banyak negara, mulai dari Inggris, Australia, Selandia Baru, Chile, Thailand, hingga Amerika Serikat (Michigan). Dalam mekanisme ini, beban pembayaran pinjaman ditentukan sedemikian rupa agar seimbang dengan pendapatan yang diperoleh. Sebagai contoh, mahasiswa yang lulus dengan nilai tinggi atau di atas rata-rata kemungkinan besar akan mendapatkan gaji yang tinggi sehingga mereka akan membayar pengembalian pinjaman lebih tinggi dan dengan jangka waktu yang relatif lebih cepat. Sementara itu, lulusan yang dibawah standar rata-rata akan membayar angsuran pengembalian lebih rendah, dengan tenor yang lebih panjang, serta kemungkinan mendapatkan pengampunan pinjaman setelah melewati jangka waktu tertentu. Dalam mekanisme seperti ini terdapat subsidi silang dimana kelompok “winners” sebetulnya membayar sebagian biaya kuliah si “losers”. Dalam istilah dan teori ekonomi, akan ada ‘*adverse selection*’ yaitu kondisi dimana peminjam yang akan disubsidi ikut berpartisipasi, sedangkan peminjam yang akan memberikan subsidi lama kelamaan akan tidak ikut serta.

Sebetulnya mekanisme ini tidak dapat diterapkan di suatu negara yang tidak memiliki dana abadi pendidikan yang cukup karena mahasiswa yang pintar tentu tidak akan mau mengambil pinjaman. Namun, mekanisme ini diyakini dapat berjalan dengan baik di Indonesia karena adanya *earmarking* khusus sebesar 20%

**“Strategi yang dapat ditempuh antara lain dengan menerapkan subsidi bunga, pembayaran berbasis pendapatan, dan berkolaborasi dengan perbankan”**

untuk pendidikan setiap tahunnya sehingga dana abadi pendidikan di dalam APBN masih tercukupi untuk memberikan pinjaman pendidikan dan mahasiswa yang memiliki intelektual tinggi dapat memilih jalur khusus beasiswa pintar.

**Mekanisme terakhir** yaitu pemerintah dapat bekerjasama dengan bank-bank umum atau Himbara untuk menyediakan fasilitas pinjaman mahasiswa dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dan memiliki tenor yang relatif panjang (20-25 tahun). Dengan kolaborasi antara pemerintah dan perbankan, maka kebijakan ini juga menjadi program *Corporate Social Responsibility* (CSR)-nya perbankan. Dengan tingkat risiko gagal bayar yang tinggi, institusi perbankan dapat menjadikan ijazah sebagai agunan, serta pemerintah wajib menjadi pihak yang menanggung apabila sewaktu-waktu terjadi *default*. Indonesia dapat mengikuti skema yang ada di India, dimana pemerintahnya memberikan skema dana jaminan kredit bagi institusi perbankan yang berkejasama dalam menyediakan pinjaman pendidikan.

### **Lesson Learned: Menghindari Potensi Masalah Pinjaman Mahasiswa**

Kebijakan pinjaman mahasiswa yang telah diterapkan lebih dulu di negara maju bukan tanpa masalah. Di Amerika Serikat, nilai pinjaman mahasiswa mencapai USD1,76 triliun per tahun 2023 dengan pertumbuhan pinjaman rata-rata sebesar 1,3% per tahun.<sup>4</sup> Tingkat gagal bayar (*default rate*) pada pinjaman mahasiswa di AS mencapai 25% dalam 5 tahun pertama pengembalian pinjaman.<sup>5</sup> Kondisi ini, dari sisi mikro, menyebabkan lulusan mengalami penurunan skor kredit, ijazah berpotensi ditahan, dan beragam konsekuensi lainnya. Dari sisi makro, potensi penurunan pendapatan lulusan memicu penurunan konsumsi masyarakat, yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pinjaman mahasiswa juga perlu mempertimbangkan struktur pasar dan skema pembiayaan yang matang. Satu hal yang tidak diinginkan adalah jika kebijakan ini justru menjadi isu yang dipolitisasi lewat agenda seperti penghapusan beban pinjaman (*student debt relief*) yang mencapai 4.9 milyar USD sebagaimana yang terjadi di AS<sup>6</sup>.

Dalam menghindari masalah tersebut, baik penyedia jasa, mahasiswa, dan pemerintah memiliki peran untuk mencegah terjadinya krisis pinjaman mahasiswa serupa (Aspen Institute, 2020). Penyedia jasa perlu memastikan informasi terkait struktur pinjaman, rencana pengembalian, dan konsekuensi gagal bayar diberikan secara lengkap serta tidak melakukan praktik – praktik eksploitasi terhadap mahasiswa dengan struktur pinjaman yang berisiko tinggi. Di sisi mahasiswa, literasi terhadap keuangan perlu diperkuat dengan memastikan bahwa mahasiswa

To keep you updated with our free monthly and quarterly reports, please subscribe. Scan the QR code below



<sup>4</sup> <https://educationdata.org/student-loan-debt-statistics>

<sup>5</sup> <https://educationdata.org/student-loan-default-rate>

<sup>6</sup> [https://www.ed.gov/news/press-releases/biden-harris-administration-announces-additional-49-billion-approved-student-debt-relief#:~:text=The%20Biden%2DHarris%20Administration%20announced,Service%20Loan%20Forgiveness%20\(PSLF\).](https://www.ed.gov/news/press-releases/biden-harris-administration-announces-additional-49-billion-approved-student-debt-relief#:~:text=The%20Biden%2DHarris%20Administration%20announced,Service%20Loan%20Forgiveness%20(PSLF).)

**“Pemerintah berperan penting dalam menyediakan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat yang ingin menempuh pendidikan ke perguruan tinggi untuk mencegah agar mahasiswa tidak lagi menggunakan pinjaman daring berbunga tinggi”**

**“Pemerintah perlu memastikan mekanisme pinjaman yang terjangkau dan tidak membebani mahasiswa”**

To keep you updated with our free monthly and quarterly reports, please subscribe. Scan the QR code below



memiliki rencana dan pertimbangan yang jelas dalam pengambilan pinjaman. Sementara dari sisi pemerintah, regulasi terkait pinjaman mahasiswa perlu dibuat dengan ketat dengan mempertimbangkan prinsip keadilan (*equity*). Kebijakan perlu dilebarkan ke arah *income-contingent loan* dibanding *mortgage-type loan* (World Bank, 2020), yang secara teori berpotensi membantu menurunkan beban pendanaan pendidikan tinggi di Indonesia (SMERU, 2018).

### Epilog

Perlu disadari bahwa masih terus diperlukan usaha keras untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Pemerintah, baik pusat dan daerah, bertanggungjawab dalam menyediakan akses pendidikan gratis melalui wajib belajar 9 tahun (pendidikan dasar) dan berbagai program beasiswa sehingga hak pendidikan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, agar masyarakat bisa terus melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, dibutuhkan biaya yang cukup besar yang harus ditanggung individu terutama mereka yang tidak memiliki latar belakang sosial-ekonomi mumpuni serta tidak memenuhi persyaratan beasiswa pada umumnya.

Pinjaman mahasiswa hadir sebagai salah satu solusi alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini tidak tercakup berbagai macam persyaratan umum beasiswa, yaitu hanya untuk masyarakat miskin atau pintar. Pemerintah berperan penting dalam menyediakan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat yang ingin menempuh pendidikan ke perguruan tinggi untuk mencegah agar mahasiswa tidak lagi menggunakan pinjaman daring berbunga tinggi seperti yang selama ini telah diformalkan oleh beberapa perguruan tinggi. Apabila program kebijakan ini berjalan, pemerintah perlu memastikan tujuan dasar tercapai, yaitu pembukaan akses seluas mungkin bagi masyarakat untuk melanjutkan studi sehingga terjadi peningkatan partisipasi masyarakat ke perguruan tinggi dan dalam jangka panjang, peningkatan kualitas SDM Indonesia.

Dalam kebijakan pinjaman mahasiswa, pemerintah perlu memastikan mekanisme pinjaman yang terjangkau dan tidak membebani mahasiswa. Strategi yang dapat ditempuh antara lain dengan menerapkan subsidi bunga, pembayaran berbasis pendapatan, dan berkolaborasi dengan perbankan. Pada akhirnya, pemerintah harus siap jika sewaktu-waktu terdapat mahasiswa yang tidak mampu melunasi pinjaman. Jika ini terjadi, maka solusi yang adil hanyalah memberikan pengampunan kepada mahasiswa yang gagal bayar sehingga biaya pendidikan tinggi mereka gratis seperti beasiswa biasa. Namun demikian, program pinjaman mahasiswa jangan sampai mengganggu alokasi beasiswa yang sudah ada, terutama beasiswa untuk masyarakat pra-sejahtera, afirmasi, dan unggul. Kembali kepada tujuan dasar kenapa ada program ini yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ke pendidikan tinggi.

### Daftar Pustaka

---

- Aspen Institute. (2020). *How States Can Solve the Student Debt Crisis*. The Aspen Institute Financial Security Program.
- Becker, G. S., & Chiswick, B. R. (1966). Education and the Distribution of Earnings. *The American Economic Review*, 56(1/2), 358-369.
- BPS. (2023). *Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Provinsi, 2021-2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- CNN Indonesia. (2024, Februari 02). *Ekonomi Keuangan*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240202200630-78-1057912/blak-blakan-danacita-soal-tawarkan-pinjol-ke-mahasiswa-itb>
- Dynarski, S. M. (2021). An Economist's Perspective On Student Loans In The United States. In *Human Capital Policy* (pp. 84-102). Edward Elgar Publishing.
- Kemendikbudristek. (2022). *Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*". Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kemenkeu. (2023). *Buletin Investasi, Keuangan, dan Ekonomi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.
- Kompas. (2024, Februari 01). *Kompas Regional*. Retrieved from Kompas: [https://bandung.kompas.com/read/2024/02/01/120813778/duduk-perkara-itb-gandeng-pinjol-untuk-bayar-ukt-tetap-berlanjut-meski-tuai?page=all#google\\_vignette](https://bandung.kompas.com/read/2024/02/01/120813778/duduk-perkara-itb-gandeng-pinjol-untuk-bayar-ukt-tetap-berlanjut-meski-tuai?page=all#google_vignette)
- Media Indonesia. (2024, Januari 29). *Humaniora*. Retrieved from Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/humaniora/647311/bayar-kuliah-mahal-mahasiswa-itb-ditawari-pinjol-dengan-bunga-175-persen>
- SMERU. (2018). Financing Higher Education in Indonesia: Assessing the Feasibility of an Income-Contingent Loan System. *SMERU Working Paper*.
- World Bank. (2020). *The Promise of Education in Indonesia*. Washington DC: World Bank.
- World Bank. (2022). *World Development Indicators: School enrollment, tertiary (% gross)*. Washington DC: World Bank.

To keep you updated with our free monthly and quarterly reports, please subscribe. Scan the QR code below

